

BAB III

KONDISI NEGARA IRAN

Dalam bab ini penulis akan membahas politik luar negeri Iran pasca revolusi islam, tentang embargo Iran secara spesifik, kebijakan luar negeri Iran terhadap Amerik Serikat. Berikut penjabarannya :

A. Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi Islam

Tujuan dari politik luar negeri negara memiliki keterkaitan dengan kondisi geografi yang strategis dan juga kondisi ekonomi. Pada saat yang bersamaan penting bagi Iran untuk mengejar ketertinggalan bidang politiknya dserta Iran tidak ingin hanya menjadi negara pemasok sumber daya alam bagi sistem ekonomi dunia. Dengan demikian Iran ingin menjadikan negaranya sebagai negara yang maju seperti negara barat pada umunya. Dalam hal ini Iran menjalankan politik luar negerinya dengan memelihara sistem politiknya yaitu berpedoman dalam ajaran Islam hal ini dimaksudkan agar dapat meonjolkan identitas Iran sebagai negara muslim. Memperthankan integritas teritorialnya serta keamanan wilayah merupakan hak dan tugas dari setiap negara. Namun berbeda dengan Iran yang menjadikan hal tersebut sebagai tujuan politik luar negeri yang khusus dan mendesak, dimana Iran terus berjuang dengan cara diplomasi hingga perang untuk mempertahankan daerah tersebut.

Memiliki sistem politik yang berkembang merupakan tujuan utama politik bagi negara Iran. Sistem politik Iran muncul karena adanya Revolusi Islam serta sistem politik sengaja dibentuk untuk mewujudkan kesadaran rakyat Iran atas kemerdekaan politik, identitas sebagai umat muslim serta hubungan terjalin dengan baik antara negara dengan rakyat Iran. Pada saat ini Iran masih berkembang, dalam hal ini Ira

memberikan landasan yang baik bagi negaranya, maka hal ini harus dijaga.

Tujuan dari ekonomi Iran hanyalah bentuk lain bagi politik luar negeri Iran. Pemerintah Iran sadar bahwa negara Iran tidak mampu bertahan kecuali dengan sistem dimana pemerintah Iran menyediakan kebutuhan dasar serta menjadikan rakyatnya hidup sejahtera. Bagi negara Iran, kondisi ekonomi yang baik akan membawa Iran pada suatu kesatuan nasional (*national cohesion*), serta dapat membawa Iran dalam legitimasi politik. Setelah adanya Revolusi Islam di Iran, pemerintah Iran mengangkat sistem ekonomi baru yaitu ekonomi kombinasi antara ekonomi nasionalisasi dan ekonomi makro, privatisasi serta kontrol pemerintah. Pada umumnya politik luar negeri dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi negara, dengan misal Iran tidak pernah memutuskan hubungan ekonomi dengan negara manapun, serta mengupayakan hak atas sanksi-sanksi yang diberikan negara-negara pada Iran.

Tujuan politik luar negeri Iran yang terakhir yaitu Iran menginginkan identitas Muslim sebagai dasar politik luar negeri Republik Islam Iran, hal ini dikarenakan Iran merasa prihatin terhadap nasib kurang beruntung yang dialami oleh umat Muslim di seluruh dunia yang menganggap bahwa hubungan Iran dengan negara lain merupakan suatu prioritas utama politik luar negeri Iran. Pemerintah Iran juga menyayangkan sistem global yang memarginalkan kaum muslim secara ekonomi, menghancurkan mereka dengan politik, serta membunuh mereka dengan kekuatan militer. Dalam hal ini Iran mengupayakan dengan cara membentuk kebijakan yang dibuat di atas kepentingan Muslim dan memajukan interaksi ekonomi serta budaya diantara dunia Muslim. Pemerintah Iran menyampaikan bawa nilai utama yaitu Islam, dimana nilai tersebut dapat direalisasikan suatu interaksi dengan Muslim agar menunjukkan gubungan yang setara dengan Barat.

B. Kebijakan Luar Negeri Iran

Kebijakan serta politik luar negeri Iran dalam konstitusi Iran yang secara resmi berlaku sejak adanya Revolusi 1979 menjelaskan bahwa Iran memiliki acuan pada prinsip-prinsip menentang dominasi, mempertahankan hak-hak umat Muslim serta mempertahankan interdependensi. Pada awal terjadinya revolusi Islam, kebijakan Iran ini dikenal dengan prinsip *Laa Syarqiyah. Laa Gorbityah* atau “Tidak Timur dan Tidak Barat”. Dalam prakteknya sendiri, politik luar negeri Iran memiliki karakteristik Non-blok, anti persekutuan militer, anti negara adidaya seperti AS serta ingin mengembangkan kerjasama dengan negara-negara Islam dalam hal ini Iran menginginkan kesatuan Islam.

Pemerintah Iran memiliki keinginan untuk menjadikan Iran sebagai negara maju serta memiliki *power* untuk menjalin kerjasama di kawasan negara Timur Tengan pada khususnya dalam kemajuan Iran kedepannya. Dalam hal ini konstitusi Iran memegang peranan penting untuk membentuk suatu kebijakan, hal tersebut juga melibatkan maksimalisasi kepentingan serta keamanan nasional. Secara formal keputusan rutin ini dapat dikatakan sebagai pengambil keputusan, namun ketika merumuskan atau rancangan suatu kebijakan pada isu-isu tertentu lebih dibutuhkan banyak waktu, banyak informasi serta pertimbangan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan adil.

Melalui otoritas, konstitusi maupun sumber-sumber berikut merupakan hal yang memiliki pengaruh besar dan juga tanggung jawab atas pembentukan atau rancangan kebijakan luar negeri Iran, diantaranya :

- 1) Kepemimpinan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung yang mana kepemimpinan ini dibantu oleh dewan kemaslahatan Negara dan Majelis Para Ahli

- 2) Konsultasi negara Iran yang digunakan untuk menetapkan prinsip hubungan luar negeri atau sebagai konteks umum untuk menyediakan pedoman perumusannya
- 3) Para Dewan pemerintah eksekutif yang terdiri dari Presiden, Dewan Tertinggi Keamanan Nasional, serta Dewan Menteri
- 4) Pemerintah dari kalangan legislatif, yang terdiri dari Majelis Islam, serta gabungan dari Dewan Wali dan Komisi Kebijakan Luar Negeri Iran
- 5) Kementerian Luar Negeri dengan fungsinya yaitu pengambilan keputusan kebijakan serta implementasi kebijakan yang telah disetujui oleh petinggi negara Iran.

Setiap tahunnya kebijakan serta politik luar negeri Iran mengalami perubahan dimana evaluasi kerja kebijakan ini nantinya akan disaring kembali jika tidak baik untuk hubungan Iran dengan negara lain. Evaluasi ini dilaksanakan melalui rapat kerja tahunan yang dihadiri para kepala perwakilan duta besar Iran di luar negeri, dan pertemuan ini diadakan di Teheran, Iran.

Pengarahan evaluasi untuk kebijakan serta politik luar merupakan usulan dari petinggi negara serta pemimpin tertinggi di negara Iran. Hasil yang diperoleh nantinya akan dibahas kembali agar mendapat persetujuan dari petinggi negara yang kemudian akan diumumkan dan hasil kebijakan akan diimplementasikan pada Iran.

C. Kondisi Negara Iran sebelum Embargo

Iran memiliki kondisi wilayah yang strategis, dalam hal ini strategi yang dimiliki oleh wilayah mullah dikaitkan dengan negara-negara internasional yang mempunyai sumber daya alam maupun sumber energi yang lebih. Dalam hal ini Iran merupakan perodusen ketiga di dunia yang memiliki sumber energi dimana sumber ini diperlukan atau merupakan sumber

kebutuhan dasar seperti gas alam dan cadangan minyak bumi. (Pers Today, 2017) Sumber energi yang dimiliki oleh Iran yang menonjol yaitu minyak mentah, Iran menjadi negara pemasok minyak mentah terbesar di dunia sama seperti halnya dengan negara-negara yang berada di wilayah Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. (BBC, 2010)

Sumber energi yang dimiliki Iran banyak mengakibatkan minyak dan gas bumi menjadi kekuatan bagi Iran untuk memajukan negara Iran dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini Iran menggunakan sumber daya cadangan minyak sebagai komoditas utama Iran serta untuk melakukan hubungan kerjasama dan perjanjian perdagangan dengan negara-negara di luar wilayah Timur Tengah, diantaranya Iran pernah melakukan kerjasama dengan Korea Selatan, Italia, Belanda, Jepang, dan juga China. Selain memiliki cadangan minyak bumi yang besar, Iran juga memiliki sumber daya alam lain yaitu tekstil, material konstruksi misal semen, kemudian makanan olahan seperti gula suling dan juga minyak sayur. Namun disamping memiliki kemajuan dalam sumber daya alamnya untuk perekonomian, Iran mengalami beberapa tantangan dalam perekonomiannya yaitu dimana tingkat pengangguran yang tinggi dan juga inflasi.

Negara Iran yang merupakan negara agraris, mengakibatkan kondisi Iran mengalami kemajuan dalam produksi minyak bumi dan gas yang mendominasi kemajuan ekonomi negara Iran. Situasi akibat minyak dan gas alam membawa Iran pada ekonomi yang baik di kawasan Timur Tengah serta di dunia internasional. Tidak hanya minyak bumi dan gas alam, Iran dikenal sebagai negara yang memiliki bahan uranium dalam pengembangan energi nuklir dengan memanfaatkan energi yang melimpahkan di dalam negerinya sendiri.

Namun disisi lain peningkatan industri pengembangan energi nuklir menjadikan Iran mendapat masalah yang cukup

besar, dimana respon negatif datang dari beberapa negara maju terkait pengembangan nuklir di Iran. Salah satunya argumne negatif muncul dari negara Amerika Serikat, dimana AS menentang program nuklir Iran yang mana dikhawatirkan program ini akan mengancam keamanan dunia Internasional. Akibatnya Amerika menjatuhkan sanksi kepada Iran dengan tujuan agar negeri para mullah ini dapat menghentikan program nuklirnya.

D. Embargo Iran Pasca Revolusi Islam

Sebelumnya Iran menjadi negara yang kera mendapatkan sanksi dari negara-negara di dunia. Dalma hal ini Iran dapat dikatakan sebgai negara yang kebal atas sanksi embargo. Embargo dapat diartikan sebagai pemerintah atau negara-negara yang memberikan batasan perdagangan atau pertukaran dengan negara tertentu atau pertukaran barang tertentu. Embargo ini muncul sebagai akibat dari keadaan pltik atau ekonomi yang tidak menguntungkan yang terjalin antar negara. Embargo dirancang untuk mengisolasi suatu negara dan menciptakan kesulitan agi suatu badan atau lembaga untuk bertindak atas masalah yang menyebabkan embargo. (Investopedia, t.thn.)

Tujuan dari embargo ini untuk mencegah pertukaran barang-barang militer dengan suatu negara. Embargo perdagangan sendiri diberikan untuk membatasi siapapun dari mengekspor negara tujuan. Banyak negara yang mengandalkan perdagangan global, dimana embargo dijadikan sebagai alat yang kuat hingga dapat mempengaruhi suatu bangsa secara ekonomi dan politik. Embargo perdagangan ini memiliki konsekuensi negatif yang serius terhadap ekonomi suatu negara yang terkena dampak embargo tersebut.

Keputusan terkait embargo perdaganan dan sanksi ekonomi lainnya yang dibuat oleh Amerika Serikat berdasarkan pada mandat ketentuan Perserikatan Bangsa Bangsa. Negara-negara sekutu saling membuat perjanjian

bersama untuk membatasi perdagangan dengan negara-negara tertentu untuk memaksa perubahan kemanusiaan atau mengurangi ancaman yang dirasakan terhadap perdamaian internasional.

Pada awal 1979, Ayatullah Ruhullah Khomeini membentuk sebuah revolusi Islam di Iran, revolusi ini dapat melengserkan kekuasaan monarki yang saat itu dipimpin oleh Shah Pahlevi. Kemenangan rakyat Iran tersebut merupakan ancaman serta bencana bagi Amerika Serikat, karena dengan adanya revolusi Amerika kehilangan sahabat karib. Terlebih kepemimpinan kaum Mullah sangat anti-Amerika Serikat. bahkan Ayatullah Khomeini sendiri menjuluki AS dengan sebutan "*big devil*". Bagi Amerika Serikat Iran memiliki kekuatan strategis bagi AS sebagai negara penyongkong wilayah Timur Tengah dari pengaruh ajaran komunisme Uni Soviet, serta menjamin keamanan sekutu utamanya di wilayah yang kaya cadangan minyak tersebut, Israel.

Iran menjadi negara di kawasan Timur Tengah yang bisa dikatakan memiliki perekonomian yang tinggi dibanding dengan negara-negara yang ada di wilayah Timur Tengah. Perekonomian Iran yang tinggi sebelum Amerika menjatuhkan sanksi embargo terhadap Iran. Peningkatan dan perancangan program nuklir membuat Iran memiliki peningkatan dalam bidang perekonomian, Iran menjadi semakin maju sekaligus menjadikan Iran sebagai negara dengan kondisi perekonomian yang baik dimata dunia internasional. Sebelumnya Iran mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat jauh sebelum ini, karena perundingan nuklir terkait pelaksanaan program nuklir. Iran yang dipimpin oleh Mullah yang mana anti-AS mengakibatkan Iran tidak menghiraukan Amerika Serikat yang ingin Iran menghentikan program nuklirnya.

Pengembangan nuklir di Iran ini tidak lain bertujuan untuk membuka investasi Amerika Serikat di Iran khususnya dalam bidang industri nuklir sipil, bidang perawatan kesehatan dan

juga untuk produksi obat-obatan. Pada mulanya Amerika mendukung pengembangan nuklir berupa program atom yang mengarah pada *U.S Atoms for Peace* atau atom untuk tujuan perdamaian. Instalasi pertama Iran ditunjukan untuk membuat penelitian nuklir dengan kekuatan hanya lima megawatt, yang diberikan kepada Amerika Serikat. Program ini mulai dilakukan pada tahun 1967 saat berdirinya *Tehran Nuclear Research Center* (TNRC) atau pusat penelitian tenaga nuklir yang berada di Teheran, pusat penelitian ini diawasi oleh *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI) atau organisasi energi atom Iran.

Dalam hal ini agar Iran mendapatkan kepercayaan bahwa program nuklir dikembangkan untuk tujuan damai, pada 1968 Iran harus menandatangani perjanjian *Non Proliferation Treaty* (NPT). (UN, 2006) NPT ini menjelaskan tiga pilar di dalamnya, di antaranya yang pertama yaitu yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir hanya lima negara saja yaitu : Prancis, Amerika, Rusia, Cina, dan Inggris. Kemudian dari lima negara tersebut tidak diijinkan untuk memberikan senjata nuklir atau memperjual-belikan senjata nuklir kepada negara lain. Mereka juga menyepakati untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-senjata nuklir dalam artian kelima negara ini tidak menggunakan senjata nuklir untuk menyerang negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Kedua *Nuclear Weapon States* (NWS) didukung untuk membuat rencana pengurangan agar persediaan senjata nuklir mereka di bawah pengawasan internasional. Pilar yang terakhir yaitu negara yang telah menandatangani NPT memiliki hak supaya menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan yang damai dan aman. Dalam hal inilah Iran sebagai negara yang ingin mengembangkan nuklir membuat produksi nuklir supaya kebutuhan listrik di Iran dapat terpenuhi. (Baysar, 2007)

Pada 2001 tepatnya tanggal 11 September terjadi serangan terrorisme di gedung *World Trade Center* (WTC), New York, Amerika Serikat. Dalam hal tersebut AS menyampaikan kebijakan *war on terrorisme* nya kepada seluruh negara dunia

dan khususnya Timur Tengah termasuk Iran, Afganistan, dan Irak. Amerika Serikat mengklaim adanya keterlibatan dari negara Iran, Afganistan serta Irak atas kejadian penyerangan gedung WTC oleh organisasi teroris. Pada pidato kenegaraan 19 Januari 2002, George W. Bush yang menjabat sebagai presiden AS menyampaikan bahwa Iran merupakan sekutu teroris dan sebagai bagian dari “rancangan kejahatan, yang berusaha mengancam perdamaian dunia”.

Selanjutnya pada 31 Januari 2006 Penasehat Keamanan Nasional Condoleezza Rice sebagai Penasehat Keamanan Nasional Amerika menyampaikan pandangan Amerika terhadap bentuk pemerintahan di Iran. Rice mengatakan bahwa “dukungan langsung Iran terhadap terorisme regional dan global, serta selalu agresif agar memproduksi senjata pemusnahan massal, dan juga mengingari niat baik, hal ini dilihat ketika penyerangan teroris terburuk dalam sejarah dunia”, Iran juga disebut sebagai negara yang mendukung dan menseponsori aktifitas kelompok Islam di Lebanon dan Palestina. Iran diduga memiliki kedekatan dengan kelompok fanatik Islam yaitu Al-Qaida yang mana kelompok ini diduga memiliki senjata pemusnah massal atau *Weapon of Mass Destruction* (WMD). (Haryono, 2017)

Pendapat bahwa Iran merupakan pendukung kelompok teroris tidak hanya datang dari Amerika, namun Israel berkeras bahwa Iran kurang dari tiga tahun akan mengembangkan senjata nuklir serta senjata jarak jauh. (Yoshitomo, 2017) Ketakutan pemerintah Amerika Serikat jika suatu saat senjata nuklir akan jatuh ditangan para teroris, hal ini merupakan anggapan Israel supaya Amerika Serikat berfikir ulang jika ingin mengajak kerjasama Iran terkait pengembangan tenaga nuklir.

Dalam hal ini sebenarnya pemerintah Iran tidak memproduksi senjata nuklir untuk kepentingan militer. Fakta lain menyampaikan bahwa Iran dibantu oleh Rusia sedang melaksanakan program nuklir untuk keperluan sipil yaitu

membangun tenaga pembangkit listrik. (tempo.co, 2016) Amerika Serikat tidak mempercayai hal tersebut, bahkan AS semakin yakin bahwa Iran menyampaikan argumen tersebut untuk menyembunyikan program senjata nuklir. Terdapat pendapat bahwa anti-proliferasi yang kuat dalam pencegahan Iran untuk memperoleh senjata nuklir, walaupun argumne ini berlaku juga untuk Israel, Pakistan, maupun India. Pada 1997, Iran telah menandatangani Konvensi Senjata Kimia, namun Iran tidak mengumumkan adanya stok senjata kimia maupun biologis serta fasilitas untuk memproduksi barang senjata berbasis nuklir.

Kepentingan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah termasuk Iran yang mana berlandaskan pada *war on terrorisme* menilai bahwa Iran merupakan negara yang terlalu berbahaya jika tidak ada badan tertinggi maupun negara yang mencegah Iran terkait pengembangan energi nuklir. Pemerintah Amerika berargumen bawa Iran sedang berusaha untuk mendapatkan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nukliryang dapat mengancam Amerika Serikat dan sekutunya. Bahkan Bush sebagai Presiden Amerika mengatakan bahwa Iran sangat agresif telah mengejar pembuatan senjata yang dimaksud disini adalah senjata pemusnah massal, mengekspor teror, kemudian beberapa pihak dari negara menekan harapan rakyat Iran akan kebebasan. (Yoshitomo, 2017)

E. Pertumbuhan Teknologi Iran Pasca Embargo

Selain Iran memiliki pogram nuklir sebagai unggulan dalam bidang teknologi, dalam bidang pendidikan Iran emiliki beberapa prestasi yang telah diraih para ilmuwan Iran. Pasca kemenangan Iran yang terjadi akibat Revolusi Islam Iran memfokuskan pada kebijakan di negaranya yaitu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan bidang teknologi. Misalnya dalam bilang kesehatan atau medis, Iran mencatat adanya prestasi yang berhasil diraih yaitu produksi obat-obatan dengan formulasi baru,

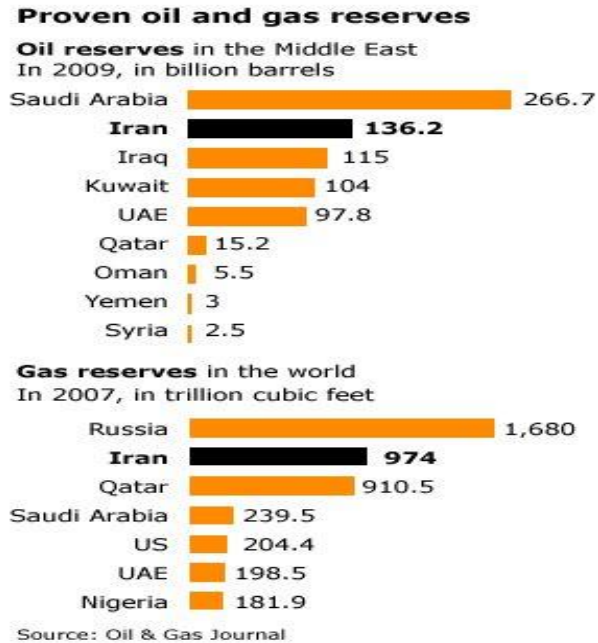
perkembangan di bidang teknik bedah khusus, penemuan mekanisme pengobatan baru, pemberantasan sejumlah penyakit serius pembangunan serta perluasan pusat-pusat penelitian ilmiah dan juga peningkatan kondisi kesehatan. Kemudian Iran juga memiliki nano teknologi, stensel dan juga teknologi nuklir yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Menurut Mohammad Javad Dehghani, berdasar pada kebijakan makro sains dan teknologi yang ditetapkan pemimpin besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Imam Khomeini menegaskan bahwa masalah indeks dasar, diplomasi sains dan teknologi serta tingkat pengaruh ekonominya. Kini, Iran menjadi negara dengan posisi yang tinggi di tingkat dunia dilihat dari aspek produksi ilmu pengetahuan. Dalam hal Iran menempati posisi yang baik di tingkat dunia dari kekuatan ilmiahnya diantara negara-negara anggota Non-Blok (GNB). (Pars Today, 2016)

Iran memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang cukup luas. diperkirakan Iran memiliki sumber energi yang terkandung di wilayahnya sekitar 13,1 % dari cadangan minyak yang ada di dunia. Hal tersebut mengakibatkan Iran menempati urutan kedua setelah Arab Saudi kemudian baru negara Irak. Selain itu Iran juga memiliki cadangan gas yang mencapai 32 triliun meter kubik, setara dengan 18 % dari total gas alam yang terdapat di dunia, Iran dalam hal ini menempati urutan kedua setelah Rusia.

Grafik 3.1

Data peringkat cadangan minyak di wilayah Timur Tengah



Sumber : (Fanack, 2012)

Iran merupakan salah satu aktor penting dalam perekonomian pasar minyak dunia, dalam hal ini Iran mengekspor 65 persen minyak mentahnya ke wilayah Asia, Eropa, dan Afrika. Dibandingkan dengan output pada tahun 1976 puncaknya 6,6 juta barel per hari, namun output industri minyak Iran tersebut telah melambat, rata-rata sekitar 4 juta barel per hari pada tahun 2005 dan 2006, dan sekitar 3,2 juta barel per hari pada awal 2012. Iran memiliki rencana untuk mengembangkan industri minyak di

Laut Kaspia dengan tujuan meningkatkan produksi minyak mentahnya, tetapi klaim Iran tentang 20 persen saham minyak Kaspia sedang diperdebatkan oleh Rusia, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Kazakhstan.

Pada tahun 2006 produksi gas alam di Iran mencapai 110 miliar meter kubik, menyediakan hampir setengah dari kebutuhan energi Iran. Dengan pemerintah merencanakan investasi besar dalam eksploitasi gas alam, bagiannya dalam konsumsi energi diperkirakan akan meningkat dengan cepat. Sebagian besar cadangan gas alam Iran diyakini masih belum dimanfaatkan.

Sementara Iran memilik menjadi eksportir minyak mentah, kapasitas kilangnya hanya menyediakan 60 persen kebutuhan domestik. Iran menghabiskan USD 4 miliar dolar untuk impor bahan bakar pada 2005 saja. Konsumsi produk dari minyak bumi telah berkembang pesat, dengan laju 8 persen per tahun sejak tahun 2000, kebutuhan akan produk minyak impor hanya akan meningkat.

Akibatnya produk-produk minyak di Iran sangat disubsidi, peningkatan impor produk-produk tersebut merupakan beban berat pada anggaran negara. Bensin adalah kekhawatiran utama: pada tahun 2006 lebih dari 45 persen diimpor. Ketika pemerintah mengumumkan penjatahan bensin, kerusuhan pecah pada musim panas 2007. Meskipun demikian Iran telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada produk minyak murni asing dengan mengurangi subsidi bensin kepada warganya. Impor bensin Iran menurun dari 130.000 barel per hari pada 2009 menjadi 50.000 barel per hari pada tahun 2011. (Fanack, 2012)

Ambisi Iran adalah untuk energi nuklir untuk memainkan peran penting dalam sumber energinya. Pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Bushehr mulai beroperasi pada tahun 2011, tetapi tidak memulai produksi komersial hingga 2013. Konstruksi di pabrik awalnya dimulai pada pertengahan tahun 1970-an namun sempat berulang kali tertunda karena adanya Revolusi Islam, Perang yang terjadi antara Iran dan Irak, serta yang terjadi baru-baru ini oleh masalah yang terkait dengan konsorsium Rusia yang dipengaruhi kontrak konstruksi.

Pemerintah Iran mengambil alih pengelolaan pabrik nuklir pada akhir 2013, sekitar waktu yang sama saat pabrik ini mulai memproduksi listrik secara komersial pada kapasitas penuh 1.000 MW, menurut BMI. Dua unit tambahan direncanakan di Bushehr yang mana masing-masing dengan kapasitas yang direncanakan 1.000 MW, menurut World Nuclear Association (WNA), serta stasiun yang kemungkinan berada di dekat Darkhovin, dengan kapasitas generasi 360 MW, walaupun rencana awal kapasitas listrik akan melebihi 1.000 MW. Iran bersama dengan Uni Emirat Arab yang merupakan satu-satunya negara *Middle East and North America Region* (MENA) lainnya dengan rencana konkret untuk mengembangkan kapasitas pembangkit listrik dari bahan bakar nuklir. Diperkirakan sekitar tahun 2016-2024, pembangkit listrik Iran akan mengalami kenaikan rata-rata sekitar 3 % per tahun, menjadi 325,3TWh. Pada periode yang sama, konsumsi listrik lokal diperkirakan akan meningkat menjadi 276,43Twh, pertambahan tahunan 3,11%.

Selain ketiga hal tersebut, Iran juga memiliki industri pertambangan batubara yang relatif kecil namun signifikan. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain di kawasan ini yang tidak memiliki

industri pertambangan batu bara, kecuali yang sangat kecil di Mesir dan sektor yang relatif besar di Turki. Diperkirakan bahwa Iran menghasilkan sekitar 1,7 juta ton batu bara di tahun-tahun terakhir Iran. Namun muncul tiga kekhawatiran besar yang menghasilkan sebagian besar batubara negara: Perusahaan Pertambangan Batubara Kerman, Alborz Coal Mines Company Timur, dan Perusahaan Batubara Alborz Tengah. (Sara, 2015)

Sebagian besar batubara digunakan untuk keperluan industri / metalurgi, meskipun pembangkit listrik tenaga batu bara sedang dalam pembangunan. Tingkat konsumsi energi dan emisi CO₂ yang tinggi, dikombinasikan dengan produksi listrik yang mahal, adalah pendorong utama untuk penerapan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan sebesar 5GW pada tahun 2020 dan untuk meningkatkan pangsa energi surya dan angin sebesar 10 persen. pada 2024. Untuk memenuhi target ini, Iran telah memperkenalkan undang-undang yang menjamin pembelian daya untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang kompetitif mulai dari 2.900-4.873 rials Iran / kWh, tergantung pada teknologi energi terbarukan yang diterapkan. Rencana ini membutuhkan investasi setidaknya \$ 4,4 miliar. (global transmission, 2017)

Luas Iran yang mencapai 1.648.195m² dan berbagai iklim pegunungan, danau, sungai dan gurun, Iran memiliki berbagai macam lingkungan alam. Ini menikmati iradiasi normal langsung yang luar biasa (DNI) dari 5,5 kWh / sqm / hari dan rata-rata 300 hari cerah per tahun. Ini terutama terjadi di daerah tengah dan selatan, seperti provinsi Yazd, Fars dan Kerman, yang memiliki DNI sekitar 5,2 hingga 5,4 kWh / sqm / hari. Kapasitas solar terpasang saat ini hanya

0,51MW. 10MW sedang dalam pembangunan. SUNA berencana untuk menginstal 500MW pada tahun 2020.

Iran juga memiliki potensi untuk menginstal 100GW energi angin. Saat ini, 15 peternakan angin hanya menghasilkan 54MW energi angin yang dipasang. Negosiasi sedang berlangsung dengan perusahaan Jerman dan Denmark, yang telah menandatangani proyek peternakan angin 48MW yang dinilai sekitar \$ 46 juta. Selain itu, Iran memiliki 10MW biomassa dan 0,44 kapasitas hidro kecil yang terpasang.